

**EFAKTIVITAS DANA BOS DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN
DI KOTA BEKASI: ANALISIS IMPLEMENTASI, TANTANGAN DAN STRATEGI
PERBAIKAN**

Galuh Nugraheni¹

Norman Rade Arfiansyah²

Ernani Yunita³

Eriyatuzzahro⁴

Aprilliantoni⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam 45 Bekasi, Indonesia

Alamat e-mail: galuh_nugraheni@unismabekasi.ac.id¹,

norman_rade@unismabekasi.ac.id², ernani_yunita@unismabekasi.ac.id³,

eriyatuzzahro@unismabekasi.ac.id⁴, aprilliantoni@unismabekasi.ac.id⁵

ABSTRACT

This study explores the strategic potential of waqf as a sustainable financing mechanism for education in the era of globalization. Conventional funding sources such as government budgets and community contributions are often insufficient to support the increasing demands for high-quality and equitable education. Through a qualitative literature review, this research analyzes scholarly articles, books, institutional reports, and regulatory documents related to waqf management and educational financing. The findings demonstrate that waqf has historically functioned as a foundation for educational development, supporting infrastructure, scholarships, research, and institutional sustainability. In the modern context, innovative models such as cash waqf, waqf sukuk, and digital waqf platforms further expand its potential role. However, challenges persist, including low waqf literacy, weak managerial capacity among nazir, and limited transparency in governance. This study concludes that optimizing waqf for educational financing requires strengthened governance, digital innovation, professional management, and enhanced public literacy. Properly developed, waqf can serve as a long-term, stable, and inclusive financial pillar for education amid global challenges.

Keywords: *Waqf, Educational Financing, Globalization, Cash Waqf, Islamic Philanthropy;*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji potensi strategis wakaf sebagai mekanisme pendanaan pendidikan yang berkelanjutan di era globalisasi. Sumber pendanaan konvensional seperti anggaran pemerintah dan kontribusi masyarakat sering kali tidak mampu memenuhi kebutuhan peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Melalui metode kajian literatur kualitatif, penelitian ini menganalisis artikel akademik, buku, laporan kelembagaan, serta regulasi terkait pengelolaan wakaf dan pendanaan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf secara historis menjadi

penopang utama perkembangan lembaga pendidikan melalui penyediaan infrastruktur, beasiswa, fasilitas riset, dan keberlanjutan operasional. Dalam konteks modern, inovasi seperti wakaf uang, wakaf sukuk, dan platform wakaf digital memperluas peluang pemanfaatan wakaf untuk pembiayaan pendidikan. Meski demikian, berbagai tantangan masih dihadapi, meliputi rendahnya literasi wakaf, lemahnya kapasitas manajerial nazir, serta kurangnya transparansi pengelolaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi wakaf sebagai pendanaan pendidikan membutuhkan penguatan tata kelola, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan profesionalisme nazir, serta edukasi publik. Jika dikelola dengan baik, wakaf berpotensi menjadi pilar pendanaan pendidikan yang berjangka panjang, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Wakaf, Pendanaan Pendidikan, Era Globalisasi, Wakaf Uang, Filantropi Islam;

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan fondasi utama bagi pembangunan bangsa dan menjadi faktor penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) di era globalisasi. Sebagai negara berkembang dengan populasi besar, Indonesia menghadapi tantangan dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat sistem pendidikan nasional, salah satunya melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai bentuk kebijakan fiskal pendidikan yang diarahkan untuk mendukung kegiatan operasional sekolah non-personalia. Program ini mulai diterapkan pada tahun 2005 sebagai respons atas ketimpangan akses pendidikan serta

upaya menekan angka putus sekolah yang masih tinggi, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dari perspektif kebijakan publik, BOS merupakan instrumen intervensi negara untuk menjamin terpenuhinya hak warga negara atas pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003).

Di Kota Bekasi yang merupakan salah satu wilayah penyangga Jakarta dengan tingkat urbanisasi sangat tinggi kebutuhan akan layanan pendidikan yang berkualitas semakin mendesak. Pertumbuhan penduduk, mobilitas ekonomi, dan dinamika sosial Kota Bekasi menuntut sekolah untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Di tengah tuntutan tersebut, Dana BOS menjadi

salah satu sumber utama pembiayaan operasional sekolah, terutama bagi sekolah negeri dan sebagian besar sekolah swasta yang memiliki keterbatasan sumber pendapatan internal. Namun demikian, efektivitas BOS tidak hanya ditentukan oleh jumlah dana yang diberikan, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan secara tepat, akuntabel, dan sesuai kebutuhan. Hal ini sejalan dengan pandangan Dye (1972) bahwa kebijakan publik tidak hanya dinilai dari keputusan pemerintah, tetapi dari bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di tingkat akar rumput (*policy in action*).

Dalam konteks implementasi kebijakan, Mazmanian dan Sabatier (1983) menegaskan bahwa efektivitas suatu kebijakan bergantung pada kejelasan regulasi, struktur birokrasi, dan kapasitas para pelaksana kebijakan. Pada kasus BOS, permasalahan implementatif seperti keterlambatan pencairan, ketidaksesuaian perencanaan RKAS, keterbatasan kompetensi SDM, serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan sering menjadi hambatan utama. Studi Purwari et al. (2024) menunjukkan bahwa pengelolaan

BOS di berbagai daerah, termasuk wilayah perkotaan, masih cenderung administratif sehingga tujuan substantif untuk meningkatkan kualitas pendidikan belum optimal tercapai. Demikian pula, penelitian Gunawan (2021) mengenai desentralisasi fiskal menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan dana publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi anggaran pendidikan secara efektif.

Salah satu tantangan paling signifikan dalam pengelolaan BOS di Kota Bekasi adalah ketimpangan antar sekolah. Sekolah besar di pusat kota memperoleh dana lebih besar karena alokasi didasarkan pada jumlah siswa, sedangkan sekolah kecil atau yang berada di daerah pinggiran hanya memperoleh dana terbatas meski memiliki kebutuhan yang sama atau bahkan lebih besar. Temuan Hartati (2025) menjelaskan bahwa formula distribusi dana berbasis jumlah siswa berpotensi memperlebar kesenjangan mutu antar sekolah, terutama terkait ketersediaan sarana dasar seperti ruang kelas, sanitasi, laboratorium, serta fasilitas pembelajaran berbasis digital. Ketimpangan ini dapat berdampak

pada kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa, terutama pada masa transformasi pendidikan saat ini yang berorientasi pada peningkatan literasi dan numerasi.

Selain itu, perubahan ekosistem pendidikan yang semakin kompleks akibat perkembangan teknologi, kurikulum yang semakin fleksibel seperti Kurikulum Merdeka, serta kebutuhan penguatan karakter dan literasi digital semakin menuntut sekolah untuk memiliki kapasitas manajerial yang baik dalam mengelola anggaran pendidikan, termasuk BOS. Becker (1964) dalam teori Human Capital menekankan pentingnya investasi pendidikan sebagai modal pembangunan jangka panjang, sehingga penggunaan Dana BOS tidak hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rutin, tetapi harus diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas pembelajaran dan kompetensi siswa. Konsep ini diperkuat oleh Ngan (2023) yang menekankan bahwa anggaran pendidikan harus dikaitkan dengan indikator kinerja jelas seperti capaian literasi, pengurangan ketimpangan akses, dan penguatan kapasitas guru.

Tantangan lainnya terkait transparansi dan akuntabilitas. Hasil

observasi serta wawancara informal yang tercantum dalam artikel menunjukkan minimnya pelibatan komite sekolah dan kurangnya sosialisasi penggunaan Dana BOS kepada orang tua siswa. Hal ini sejalan dengan temuan Susanti (2022) yang menjelaskan bahwa rendahnya partisipasi publik menyebabkan penggunaan Dana BOS tidak selalu mencerminkan kebutuhan riil sekolah. Padahal, partisipasi masyarakat merupakan prinsip dasar dalam tata kelola anggaran publik untuk mencegah penyalahgunaan anggaran serta meningkatkan kepercayaan publik.

Kesenjangan antara regulasi dan praktik lapangan di Kota Bekasi juga terlihat dari beban administratif guru yang harus menangani laporan penggunaan dana BOS (SPJ dan laporan digital) di tengah tuntutan profesionalisme guru dalam aspek pedagogik. Sebagaimana dikritisi oleh Taufiq (2020), beban kerja non-pedagogik yang tinggi berdampak pada turunnya fokus guru dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga berpengaruh pada kualitas interaksi belajar-mengajar.

Fenomena di atas memperlihatkan bahwa efektivitas

BOS di Kota Bekasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas sekolah dalam melakukan perencanaan berbasis data (*needs assessment*), manajemen keuangan yang profesional, kolaborasi antar pemangku kepentingan (pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat), serta sistem pengawasan yang kuat. Oleh karena itu, analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana BOS dijalankan, apa saja hambatanannya, dan strategi apa yang perlu dilakukan menjadi penting bagi perbaikan kebijakan ke depan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Dana BOS di Kota Bekasi melalui pendekatan analitis terhadap kebijakan nasional, kondisi lapangan, dan pandangan stakeholder pendidikan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan BOS dan realitas implementasi di sekolah, termasuk tantangan teknis, ketidaksesuaian perencanaan, kapasitas manajerial, ketimpangan pendanaan, serta partisipasi publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi

pengembangan kajian kebijakan pendidikan serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat untuk meningkatkan mutu tata kelola Dana BOS, sehingga dapat berfungsi sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bekasi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Bekasi serta menilai efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pendekatan kualitatif dipilih karena relevan untuk menelaah fenomena sosial dan kebijakan publik yang kompleks, sebagaimana dikemukakan Mazmanian dan Sabatier (1983) bahwa implementasi kebijakan membutuhkan pemahaman mendalam mengenai perilaku aktor, proses administratif, serta kondisi lingkungan tempat kebijakan dijalankan. Desain penelitian berupa studi literatur dan refleksi lapangan dilakukan untuk menggabungkan analisis berbasis teori dengan temuan

empiris di lapangan. Data sekunder dikumpulkan melalui penelaahan dokumen kebijakan nasional, seperti petunjuk teknis BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, laporan resmi Dinas Pendidikan Kota Bekasi, serta hasil penelitian sebelumnya yang membahas efektivitas BOS (Purwari et al., 2024). Literatur yang digunakan juga mencakup teori kebijakan publik Dye (1972), konsep desentralisasi fiskal Oates (1972), serta kajian human capital oleh Becker (1964) untuk memperkuat landasan teoritis penelitian.

Data empiris diperoleh melalui refleksi lapangan yang bersumber dari wawancara informal dengan kepala sekolah, guru, dan wali murid di beberapa sekolah dasar dan menengah di Kota Bekasi. Temuan lapangan, seperti keterlambatan pencairan dana, keterbatasan kompetensi manajerial bendahara dan kepala sekolah, serta rendahnya pelibatan komite sekolah, sejalan dengan temuan Susanti (2022) yang menyatakan bahwa beban administratif dan minimnya pengawasan berpengaruh besar terhadap efektivitas implementasi

BOS. Selain itu, ketimpangan alokasi dana dan kapasitas sekolah seperti yang dijelaskan Hartati (2025) menjadi pertimbangan penting dalam analisis ini karena memengaruhi kemampuan sekolah dalam memaksimalkan pemanfaatan BOS. Data refleksi lapangan kemudian dibandingkan dengan laporan resmi dan penelitian terdahulu untuk memastikan akurasi temuan.

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara iteratif. Pada tahap reduksi data, peneliti mengidentifikasi informasi penting terkait kelemahan implementasi, seperti kendala pelaporan digital, keterbatasan infrastruktur sekolah kecil, serta ketidaksesuaian antara rencana anggaran dan kebutuhan riil sekolah. Tahap penyajian data dilakukan dengan mengkonstruksi narasi yang menghubungkan temuan lapangan dengan teori dan hasil penelitian sebelumnya, misalnya kajian Gunawan (2021) yang menyoroti lemahnya tata kelola desentralisasi fiskal pada sektor pendidikan. Sementara itu, tahap penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-

menerus dengan memverifikasi konsistensi data melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan dokumen resmi, hasil observasi, dan wawancara informal. Untuk meningkatkan validitas data, peneliti juga melakukan *member checking* dengan beberapa informan untuk memastikan bahwa interpretasi data sesuai dengan kondisi nyata.

Dengan metodologi ini, penelitian tidak hanya memberikan gambaran faktual mengenai implementasi BOS di Kota Bekasi, tetapi juga menyediakan analisis teoritis yang kuat mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan. Metode ini memungkinkan peneliti menilai sejauh mana Dana BOS mampu menjalankan tujuan utamanya dalam peningkatan mutu pendidikan, sekaligus mengidentifikasi kendala sistemik yang perlu diperbaiki pada tingkat sekolah maupun pemerintah daerah. Pendekatan integratif yang menggabungkan kajian teori kebijakan publik (Dye, 1972), implementasi kebijakan (Mazmanian & Sabatier, 1983), desentralisasi fiskal (Oates, 1972), serta teori human capital (Becker, 1964) memberikan landasan akademik yang kuat untuk

mendukung interpretasi hasil penelitian dan penyusunan rekomendasi strategis bagi peningkatan pengelolaan Dana BOS di masa depan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis terhadap implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Bekasi menunjukkan adanya dinamika yang kompleks antara kebijakan nasional dan kondisi riil di tingkat sekolah. Meskipun secara normatif BOS dirancang untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, praktik di lapangan justru mengungkap berbagai tantangan struktural dan teknis. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa efektivitas BOS tidak hanya bergantung pada besaran dana, tetapi juga pada kualitas tata kelola, kapasitas pelaksana, kesiapan infrastruktur, dan tingkat partisipasi publik. Keseluruhan temuan ini merefleksikan fenomena yang pernah dijelaskan oleh Dye (1972) bahwa kebijakan publik baru dapat dinilai efektif bila mampu menghasilkan perubahan nyata pada kelompok sasaran. Dalam konteks ini, efektivitas BOS perlu dianalisis lebih dalam pada aspek implementasi, pemerataan, partisipasi stakeholder,

dan dampaknya terhadap kualitas pembelajaran.

Implementasi Dana BOS: Antara Regulasi dan Realitas Lapangan

Secara normatif, implementasi Dana BOS mengikuti Petunjuk Teknis BOS dari Kemendikbudristek yang menekankan prinsip fleksibilitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Setiap sekolah diwajibkan menyusun RKAS berbasis kebutuhan aktual, melakukan pencatatan keuangan melalui ARKAS, belanja melalui SIPLah, serta menyampaikan laporan secara transparan. Namun hasil telaah dokumen dan refleksi lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan di Kota Bekasi sering kali tidak sejalan dengan pedoman tersebut. Perencanaan RKAS masih cenderung administratif dan mengikuti pola tahun sebelumnya tanpa kajian kebutuhan mendalam. Hal ini selaras dengan kritik yang disampaikan oleh Mazmanian & Sabatier (1983), bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pelaksana memahami dan menerjemahkan kebijakan ke dalam konteks lokalnya.

Keterlambatan pencairan Dana BOS juga menjadi persoalan krusial.

Sekolah sering kali harus menunda berbagai kegiatan pembelajaran karena dana belum cair pada waktu yang ditentukan. Temuan ini konsisten dengan penelitian Susanti (2022) yang mengidentifikasi bahwa keterlambatan pencairan BOS menyebabkan sekolah kesulitan menganggarkan kebutuhan mendesak seperti pengadaan ATK, pemeliharaan fasilitas, dan dukungan pembelajaran daring. Bagi sekolah dengan kemampuan finansial rendah, keterlambatan ini berdampak langsung pada kualitas layanan pendidikan.

Tantangan Administratif: Beban Pelaporan dan Kompetensi SDM

Penggunaan BOS di Kota Bekasi masih sangat dipengaruhi oleh kapasitas manajerial kepala sekolah dan bendahara. Banyak sekolah menghadapi kesulitan dalam mengoperasikan ARKAS dan SIPLah karena kurangnya pelatihan teknis. Guru yang sebelumnya fokus pada kegiatan pembelajaran kini turut terbebani dengan tugas administratif, seperti membuat SPJ, mengunggah bukti transaksi, dan memeriksa kesesuaian belanja dengan kode akun. Kondisi ini sejalan dengan

temuan Taufiq (2020), yang menyatakan bahwa beban administratif yang tinggi dapat menurunkan profesionalitas guru karena waktu pengajaran berkurang secara signifikan.

Selain itu, keterbatasan SDM menyebabkan kesalahan teknis dalam pelaporan BOS menjadi hal yang umum ditemui, termasuk ketidaktepatan pengklasifikasian belanja, ketidaksesuaian antara RKAS dan realisasi, serta keterlambatan upload dokumen. Struktur birokrasi yang berlapis dari sekolah, pengawas, dinas pendidikan, hingga kementerian sering membuat proses pelaporan menjadi rumit dan memakan waktu lama. Gunawan (2021) telah menekankan bahwa desentralisasi fiskal hanya akan efektif bila didukung oleh kesiapan SDM dan tata kelola yang matang sesuatu yang masih menjadi tantangan di Kota Bekasi.

Ketimpangan Antar Sekolah: Distribusi Dana dan Kualitas Fasilitas

Temuan penting lainnya adalah adanya kesenjangan antara sekolah besar dan kecil dalam pemanfaatan Dana BOS. Karena formula BOS

berbasis jumlah siswa, sekolah-sekolah besar di pusat kota menerima alokasi dana yang relatif mencukupi bahkan berlebih, sehingga mereka mampu melengkapi fasilitas seperti LCD proyektor, komputer, perpustakaan digital, dan ruang belajar yang nyaman. Sebaliknya, sekolah kecil di wilayah pinggiran hanya menerima dana minimal meskipun menghadapi banyak keterbatasan seperti ruang kelas yang rusak, sanitasi tidak layak, kekurangan perangkat TIK, dan minimnya sarana literasi.

Hartati (2025) menjelaskan bahwa ketimpangan berbasis formula siswa ini berpotensi memperlebar kesenjangan mutu antar sekolah. Sekolah kecil yang kekurangan fasilitas akan semakin tertinggal karena mereka tidak memiliki cukup anggaran untuk memperbaiki layanan pendidikan. Kondisi ini bertentangan dengan semangat pemerataan layanan pendidikan nasional.

Ketimpangan tidak hanya terjadi dalam hal pendanaan, tetapi juga dalam hal kapasitas manajemen. Sekolah besar dengan SDM cakap mampu mengalokasikan dana BOS untuk inovasi pembelajaran seperti pelatihan guru, kegiatan literasi, dan

pengembangan kurikulum. Namun sekolah kecil lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar. Akibatnya, BOS belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen peningkatan mutu pendidikan sebagaimana ditujukan oleh program Kurikulum Merdeka.

Persepsi Stakeholder: Suara Kepala Sekolah, Guru, dan Orang Tua

Wawancara informal yang tercantum dalam data penelitian menunjukkan bahwa seluruh pihak merasakan manfaat BOS namun tetap mengeluhkan tantangan yang ada. Kepala sekolah mengungkapkan perlunya pelatihan teknis lebih intensif mengenai manajemen keuangan sekolah. Guru mengaku kewalahan karena beban administratif dan pelaporan digital menyita banyak waktu yang seharusnya digunakan untuk merancang pembelajaran. Sementara wali murid mengaku tidak mengetahui penggunaan dana BOS karena sosialisasi dari sekolah masih minim. Ini menegaskan adanya masalah transparansi dan kurangnya partisipasi publik.

Padahal, sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik, masyarakat

harusnya dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan anggaran pendidikan. Hal ini sejalan dengan gagasan Oates (1972) yang menekankan bahwa desentralisasi harus melibatkan partisipasi warga agar kebijakan lebih responsif dan efektif. Dengan minimnya pelibatan publik, rasa kepemilikan masyarakat terhadap program BOS menjadi rendah, sehingga potensi dukungan non-fiskal dari masyarakat tidak berkembang.

Analisis Dampak BOS terhadap Kualitas Pembelajaran

Secara teoritis, dana BOS seharusnya berkontribusi terhadap peningkatan mutu pembelajaran sebagaimana ditegaskan oleh teori Human Capital (Becker, 1964). Namun hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dana BOS masih digunakan untuk kegiatan rutin dan administratif, seperti perawatan fasilitas sekolah, pembayaran langganan internet, dan pembelian alat tulis. Kegiatan peningkatan kompetensi guru, penyediaan program literasi, dan pembelajaran berbasis teknologi belum menjadi prioritas utama di banyak sekolah.

Ngan (2023) menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan yang ideal harus diorientasikan pada pencapaian *output* dan *outcome* pendidikan, bukan sekadar akumulasi belanja. Pada kasus Kota Bekasi, BOS belum sepenuhnya diarahkan untuk meningkatkan indikator mutu seperti literasi membaca, numerasi, kepuasan belajar siswa, dan kompetensi profesional guru. Sekolah cenderung mengejar kelengkapan administrasi daripada peningkatan kualitas pembelajaran.

Evaluasi Kritis: BOS sebagai Instrumen Transformasi atau Sekadar Rutinitas?

Kajian ini menunjukkan bahwa implementasi BOS di Kota Bekasi masih menghadapi berbagai hambatan sistemik. Mulai dari perencanaan yang tidak berbasis data, keterbatasan kompetensi SDM, sistem pelaporan yang belum optimal, hingga minimnya partisipasi publik. Padahal, dalam kerangka kebijakan pendidikan modern, BOS seharusnya mendukung transformasi sekolah menuju pembelajaran berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

Ketika BOS hanya diperlakukan sebagai anggaran rutin, maka

fungsinya sebagai instrumen peningkatan mutu tidak akan optimal. Sebaliknya, jika dikelola secara profesional, transparan, dan berbasis kebutuhan, BOS dapat menjadi motor penggerak utama dalam mendorong inovasi pendidikan, terutama di kota besar seperti Bekasi yang memiliki dinamika sosial-ekonomi kompleks.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Bekasi memiliki kontribusi penting dalam mendukung keberlangsungan operasional sekolah, khususnya dalam pembiayaan komponen non-personalia seperti pengadaan sarana pembelajaran, perawatan fasilitas, pembayaran utilitas, serta pemenuhan kebutuhan dasar penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks perkotaan seperti Bekasi yang ditandai oleh tingginya mobilitas penduduk, kompleksitas sosial-ekonomi, serta kebutuhan pendidikan yang beragam, BOS berperan sebagai instrumen vital untuk memastikan bahwa sekolah tetap dapat menjalankan proses pendidikan secara stabil. Namun demikian, efektivitas program BOS tidak hanya ditentukan oleh besarnya

alokasi dana, tetapi juga oleh kualitas implementasi, kapasitas manajerial, sistem pengawasan, dan keterlibatan stakeholder.

Penelitian ini secara tegas menunjukkan bahwa kesenjangan antara kebijakan nasional dan praktik di lapangan masih menjadi persoalan mendasar. Penyusunan RKAS yang seharusnya berbasis kebutuhan nyata sering kali bersifat administratif dan tidak mencerminkan prioritas pengembangan sekolah. Temuan ini memperkuat pendapat Mazmanian & Sabatier (1983) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana dalam menafsirkan dan mengeksekusi kebijakan sesuai konteks lokal. Keterlambatan pencairan dana, beban administratif yang tinggi, dan performa sistem digital (ARKAS-SIPLah) juga menjadi hambatan yang konsisten ditemukan dalam studi-studi terdahulu, termasuk yang dijelaskan oleh Susanti (2022).

Di sisi lain, penelitian ini mengungkap adanya ketimpangan kapasitas antar sekolah di Kota Bekasi. Sekolah besar dengan jumlah siswa tinggi cenderung memiliki dana lebih besar dan kapasitas manajerial yang lebih memadai sehingga mampu

memanfaatkan BOS sebagai peluang pengembangan. Sebaliknya, sekolah kecil dan sekolah di wilayah pinggiran menghadapi keterbatasan pendanaan, minimnya SDM terlatih, dan keterbatasan sarana prasarana yang menyebabkan pemanfaatan BOS hanya berfungsi untuk kebutuhan rutin. Temuan ini konsisten dengan argumen Hartati (2025) bahwa formula pembiayaan berbasis jumlah siswa dapat memperdalam ketimpangan antar sekolah, terutama jika tidak disertai skema afirmatif bagi sekolah dengan kondisi paling membutuhkan.

Selanjutnya, penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat keterlibatan publik dalam pengelolaan BOS masih rendah. Minimnya sosialisasi mengenai alokasi dan pemanfaatan dana menyebabkan orang tua dan masyarakat tidak memahami bagaimana BOS digunakan, sehingga pengawasan partisipatif tidak berjalan optimal. Hal ini bertentangan dengan prinsip governance publik yang dianjurkan dalam teori desentralisasi Oates (1972), yang menekankan pentingnya partisipasi warga agar pelayanan publik menjadi lebih responsif dan akuntabel. Kurangnya transparansi ini

juga berimplikasi pada rendahnya rasa kepemilikan masyarakat terhadap sekolah, meskipun BOS sendiri merupakan dana publik.

Dari perspektif mutu pendidikan, penelitian ini menunjukkan bahwa BOS belum sepenuhnya memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Sebagian besar dana masih terserap untuk kebutuhan operasional, sementara inovasi pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, dan penguatan literasi serta numerasi belum menjadi fokus utama. Padahal, menurut teori Human Capital (Becker, 1964), pembiayaan pendidikan harus diarahkan pada peningkatan kualitas guru dan pembelajaran sebagai investasi jangka panjang untuk pembangunan manusia. Ketika BOS hanya dipergunakan untuk rutinitas, maka peluang transformasi kualitas pendidikan tidak dapat tercapai secara signifikan.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa BOS memiliki potensi strategis yang sangat besar apabila dikelola dengan lebih profesional, transparan, dan berbasis kebutuhan nyata. Penguatan kapasitas kepala sekolah dan bendahara, implementasi sistem

perencanaan berbasis data (*needs assessment*), serta pemanfaatan teknologi digital yang lebih optimal merupakan langkah penting untuk meningkatkan efektivitas BOS. Selain itu, pembentukan mekanisme pengawasan kolaboratif dengan melibatkan komite sekolah, orang tua, dan masyarakat dapat meningkatkan transparansi serta memperkuat akuntabilitas.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa BOS belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen transformasi pendidikan di Kota Bekasi, tetapi baru berperan sebagai instrumen pendukung operasional. Agar BOS dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan mutu pendidikan, diperlukan reformasi kebijakan yang terarah dan berkelanjutan, termasuk perbaikan mekanisme distribusi dana, penguatan pelatihan manajerial bagi sekolah, pemfokusan BOS pada inovasi pembelajaran, serta peningkatan tata kelola berbasis teknologi. Dengan demikian, BOS dapat menjadi alat strategis dalam mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif, merata, dan berkualitas

sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Becker, G. S. (1964). *Human capital: A theoretical and empirical analysis with special reference to education*. University of Chicago Press.
- Dye, T. R. (1972). *Understanding public policy*. Prentice-Hall.
- Mazmanian, D., & Sabatier, P. (1983). *Implementation and public policy*. Harper Collins.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.

Jurnal

- Gunawan, H. (2021). Desentralisasi fiskal dan tantangan pengelolaan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 113–125.
- Hartati, S. (2025). Ketimpangan alokasi pendanaan pendidikan berbasis jumlah siswa. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 9(1), 45–60.

Ngan, T. (2023). Evaluasi pendanaan pendidikan dalam perspektif outcome-based budgeting. *International Journal of Education Policy*, 12(4), 201–215.

Purwari, R., & kolega. (2024). Evaluasi implementasi Dana BOS di daerah perkotaan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia*, 16(1), 55–70.

Susanti, A. (2022). Pengaruh keterlambatan pencairan BOS terhadap kinerja sekolah. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Pendidikan*, 8(3), 121–134.

Taufiq, B. (2020). Dampak beban administratif terhadap profesionalisme guru. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 7(2), 98–110.

Peraturan Pemerintah

- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Petunjuk teknis pengelolaan Dana BOS Reguler tahun 2023*.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

Republik Indonesia. (2005–2023).

*Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan terkait Dana
BOS (berbagai edisi).*

Laporan & Regulasi

Badan Pusat Statistik Kota Bekasi.

(2023). *Statistik pendidikan Kota
Bekasi.*

Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

(2023). *Laporan realisasi Dana
BOS pada satuan pendidikan
Kota Bekasi tahun 2022–2023.*

Kementerian Keuangan Republik

Indonesia. (2023). *Laporan
Transfer ke Daerah dan Dana
Desa (TKDD).*

Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Republik Indonesia.
(2022). *Data Pokok Pendidikan
(Dapodik) Kota Bekasi.*